



JURNAL KESEHATAN INDONESIA

Administrasi Kesehatan USY

JOURNAL HOMEPAGE: [HTTPS://JURNAL.USY.AC.ID/INDEX.PHP/JUKI](https://jurnal.usy.ac.id/index.php/juki)



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI SMK NEGERI 8 KOTA MAKASSAR

Adi Putra Pratama^{1*}, Astrid Pratiwi Rufaedah Amir²

¹Prodi Administrasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Kesehatan Datu Kamanre

²Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Politeknik Mega Rezky

Adiputrapratama758@gmail.com^{1*}, ashpratiwi@gmail.com²

ABSTRAK

Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam jumlah perokok pria berusia di atas 15 tahun berdasarkan data The Tobacco Atlas tahun 2015. Riset Kesehatan Dasar juga menunjukkan peningkatan signifikan perokok usia dini. Pada tahun 1995, prevalensi perokok usia 10–14 tahun sebesar 8,9%, dan meningkat 100% menjadi 18% pada tahun 2013. Selain itu, 64,9% laki-laki dan 2,1% perempuan masih merokok pada tahun tersebut, dengan ditemukan 1,4% perokok usia 10–14 tahun dan 9,9% perokok pada kelompok tidak bekerja (RISKESDAS, 2013). Indonesia sebenarnya memiliki regulasi mengenai kawasan tanpa rokok (KTR), antara lain melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencetuskan area bebas asap rokok. Namun, implementasi KTR di berbagai wilayah masih lemah dan kurang tegas. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan KTR berdasarkan aspek disposisi atau sikap dan struktur birokrasi di SMK Negeri 8 Makassar. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan teknik wawancara mendalam serta observasi berkelanjutan di lingkungan sekolah. Jumlah informan sebanyak delapan orang. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memiliki sikap positif dan mendukung penerapan KTR di SMK Negeri 8 Makassar. Namun, dari sisi struktur birokrasi, sekolah belum memiliki SOP khusus terkait KTR, meskipun larangan merokok telah tercantum dalam tata tertib sekolah. Diperlukan peningkatan pengawasan implementasi KTR pada sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, serta penyusunan sanksi yang lebih tegas untuk menertibkan larangan merokok di kawasan sekolah. Kata kunci : Implementasi, kawasan tanpa rokok, disposisi/sikap, struktur birokrasi

ABSTRACT

Indonesia ranks first in the world for the number of male smokers aged over 15 years, based on The Tobacco Atlas 2015. The National Basic Health Research also indicates a significant increase in early-age smoking. The prevalence of smokers aged 10–14 rose from 8.9% in 1995 to 18% in 2013. In 2013, 64.9% of men and 2.1% of women were still smoking, with 1.4% of smokers aged 10–14 years (RISKESDAS, 2013). Although Indonesia has regulations concerning smoke-free areas, their enforcement remains weak. This study aims to explore the implementation of smoke-free area policies based on disposition and bureaucratic structure at SMK Negeri 8 Makassar. Using a descriptive design, the study employed in-depth interviews and continuous observation with eight informants. Data analysis included reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that informants support the implementation of smoke-free areas at the school. However, the bureaucratic structure lacks specific SOPs, although the smoking ban is included in school regulations. Strengthened oversight and firmer sanctions from the provincial education office are needed to improve policy implementation.

Keywords: Implementation, Smoke-Free Area, Disposition/Attitude, Bureaucratic Structure

PENDAHULUAN

Merokok menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun aspek sosial-budaya. *World Health Organization* memprediksi kematian di seluruh dunia karena produk tembakau akan melebihi delapan juta per tahun pada tahun 2030 dan 70% korban berasal dari negara berkembang. Pemantauan kebiasaan merokok menurut hasil penelitian *WHO Report On The Global Tobacco Epidemic 2011* terlihat bahwa kebiasaan merokok tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terjadi di negara berkembang yang berada di Benua Afrika dan Asia (WHO, 2011).

Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa, pada saat ini, sangat sedikit orang yang memulai merokok atau menjadi perokok setelah remaja mereka tahun. Di Amerika Serikat, hampir sembilan dari 10 perokok dewasa saat ini (89%) memulai kebiasaan sebelum usia 19 tahun. Pada usia ini, kebanyakan remaja yang akan merokok sudah menjadi atau sedang dalam proses menjadi perokok yang terbiasa (Jacobson, 2018).

Negara Indonesia sedang menjadi sorotan dunia karena masyarakatnya yang menggunakan tembakau terlampau banyak. Menurut data kementerian kesehatan menunjukkan peningkatan prevalensi perokok pada tahun 1995 sebanyak 27%, meningkat menjadi 36,3% pada tahun 2013 (Depkes, 2016).

Indonesia menduduki peringkat satu dunia untuk jumlah perokok pria di atas usia 15 tahun. Hal ini berdasarkan data terbaru dari *The Tobacco Atlas* tahun 2015. Riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berumur 10-14 tahun menjadi perokok. Perokok usia dini mengalami peningkatan 100% , pada tahun 1995 sebesar 8,9% dan angka tersebut terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 18%. 64,9 persen laki-laki dan 2,1 persen perempuan masih menghisap rokok tahun 2013. Ditemukan 1,4 persen perokok umur 10-14 tahun, 9,9 persen perokok pada kelompok tidak bekerja. (RISKESDAS, 2013).

Indonesia memiliki peraturan yang menyebutkan perlunya kawasan tanpa rokok atau kawasan bebas asap rokok. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mulai mencetuskan area bebas asap rokok untuk lingkungan sehat. Namun, peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia cenderung kurang ditegakkan dan tidak tegas.

Tahun 2011, di Indonesia tercatat sudah ada 21 provinsi dan 50 kabupaten/kota di wilayah kerjanya yang memiliki peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok bagi kesehatan. Sedangkan di tahun 2012, daerah yang memiliki atau melaksanakan aturan Kawasan Tanpa Rokok meningkat menjadi 10 provinsi dan 226 kabupaten/kota se Indonesia (Info DATIN, 2014).

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud dibagi atas dua yaitu tempat pendidikan formal diantaranya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas dan tempat pendidikan Nonformal yaitu Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Taman Kanak-kanak, Pusat Belajar Masyarakat (PERDA No. 4 Tahun 2013).

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Guru BK SMK Negeri 8 kota Makassar, Kepala sekolah telah melakukan sosialisasi kepada guru dan siswa terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terbukti dengan adanya gambar peringatan larangan merokok berupa stiker. Ada beberapa siswa yang sering kedapatan merokok di toilet sekolah, dibelakang kelas perhotelan dan diperkuat dengan adanya puntung rokok yang didapat, siswa yang kedapatan merokok akan mendapatkan sanksi berupa surat pernyataan dan pemanggilan orangtua/wali. Selain siswa, beberapa guru juga terlihat merokok di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 8 dengan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan sekolah. SMK Negeri 8 Makassar. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci yang dimaksud disini ialah kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) SMK Negeri 8 Makassar. Informan Biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan biasa yang dimaksud disini ialah siswa yang diambil dari *snowball sampling*. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Informan dalam penelitian ini ada 8 orang yang terdiri dari 6 informan biasa dan 2 informan kunci.

Adapun yang menjadi informan kunci adalah Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 8 Makassar dan informan biasa adalah Siswa SMK Negeri 8 Makassar dan bersedia untuk di wawancarai. Berikut karakteristik informan yang terlibat dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 8 Makassar

Tabel 1.1

Karakteristik Informan Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Kode Informan	Umur (tahun)	Jenis Kelamin	Keterangan
1	HR	54	Perempuan	Informan Kunci
2	RH	50	Perempuan	Informan Kunci
3	LH	15	Laki-laki	Informan Biasa
4	RD	16	Laki-laki	Informan Biasa
5	MN	15	Laki-laki	Informan Biasa

6	RS	16	Perempuan	Informan Biasa
7	MT	15	Laki-laki	Informan Biasa
8	DS	16	Perempuan	Informan Biasa

Penelitian ini menggunakan teori George C Edward tentang implementasi kebijakan publik. Teori ini menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang harus di perhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana keempat faktor tersebut menjawab tujuan penelitian.

1. Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap adalah karakteristik dari pelaksana kebijakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana karakteristik pelaksana yang mendukung atau menolak kebijakan. Pelaksana diharapkan memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan yang terpilih sesuai dengan kapasitasnya harus mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan.

Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah meliputi Kepala Sekolah, Wakasek kesiswaan, Guru bimbingan konseling, Pembina organisasi, LSBN, OSIS Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah diharapkan memiliki dedikasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab mengawasi dan mensukseskan kebijakan tersebut dengan bekerja sama dengan seluruh Guru dan karyawan. Pihak sekolah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah kepada kelompok sasaran, pemasangan papan tanda dilarang merokok di kawasan sekolah. Sikap pelaksana kebijakan di SMK Negeri 8 Makassar menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu RM selaku Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 8 Makassar :

“seharusnya kawasan tanpa rokok ini bisa menjadi solusi supaya tidak ada lagi siswa yang merokok, apalagi guru-guru biar tidak merokok mi di area sekolah. Kepala sekolah itu selalu himbau guru-guru yang merokok biasa dalam rapat dia bilang ededeh berhenti sai mki itu merokok, dag disakah itu berhenti merokok ? biasa mi na bilang bu tidak bisa ka mengajar sakit kepala, tapi tidak semua ji begitu apalagi disini itu sedikit ji guru laki-laki mungkin yah 7 orang ji itupun tdk semuanya merokok” (HR, 54 Tahun)

Pendapat terhadap pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 8 Makassar mendukung adanya kawasan tanpa rokok disekolah. Kepala sekolah, Guru dan siswa setuju dengan adanya kebijakan tersebut Berikut pendapat dari Ibu MK selaku Kepala sekolah di SMK Negeri 8 Makassar :

“ya jelas kita dukung kawasan tanpa rokok karna memang sudah menjadi salah satu program sekolah bahwa sekolah ini harus ee bebas rokok termasuk seperti misalnya ee aula kita digunakan orang luar untuk melakukan kegiatan itu sebenarnya kita sudah ee sudah tulis disitu bahwa ini merupakan kawasan

tanpa rokok sehingga mereka bisa membaca bagi orang yang memang peduli sudah pasti tau bahwa kawasan ini dilarang merokok.” (RH, 50 Tahun)

Tanggapan lain juga diberikan oleh ibu LH selaku Guru BK SMK Negeri 8 Makassar bahwa :

“boleh dikata 99,9% semua mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok disekolah, hanya segelintir pasti yang tidak mendukung paling yang merokok ji yang tidak mendukung.” (LH, 50 Tahun)

Tanggapan lain juga diberikan oleh RD selaku siswa SMK Negeri 8 Makassar bahwa :

“kalau mendukung jelasmi sa dukung kak, karena masih banyak temanku merokok jadi asapnya itu mengganggu, lebih bahaya itu asapnya.” (RD, 16 Tahun)

Tanggapan lain juga diberikan oleh RM selaku siswa SMK Negeri 8 Makassar bahwa :

“saya fikir hampir semua mendukung ini kawasan tanpa rokok disekolah guru-guru, siswa, semuanya karena merokok ini berdampak bagi kesehatan, apalagi diusia sekarang yang masih muda tapi paru-parunya sudah kotor berdampak juga bagi masa depan.” (RM, 16 Tahun)

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa sikap atau disposisi pelaksana kebijakan di SMK Negeri 8 Makassar mendukung adanya kawasan tanpa rokok di sekolah.

2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena melibatkan banyak pihak di dalamnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab. Pemimpin struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar adalah Kepala Sekolah.

Sebuah implementasi kebijakan tentu saja memiliki Standart Operating Procedure (SOP). SOP digunakan sebagai pedoman oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar tidak sepenuhnya serupa dengan SOP, hanya dilakukan secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh ibu HR selaku kepala sekolah SMK Negeri 8 Makassar :

“Untuk SOPnya kebijakan kawasan tanpa rokok ini mungkin kita belum menjalankan sebagaimana mestinya, namun sekolah sudah memasukan larangan merokok di sekolah pada tata tertib. Pelaksanaan tata tertib diawasi oleh Kepala Sekolah dibantu Guru dan organisasi terkait. Pihak sekolah juga sudah memasang tanda dilarang merokok. Tidak ada pedoman dari sekolah untuk melaksanakan kebijakan tanpa rokok, hanya untuk melokalisasi para perokok supaya tidak mengganggu yang tidak merokok.” (HR, 54 Tahun)

Pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai tim yang terdiri dari siswa yang tergabung dalam organisasi khususnya organisasi LSBN dan OSIS, Guru bimbingan konseling, dan diawasi oleh kepala sekolah. Tugas dari tim tersebut dijelaskan oleh ibu HR selaku kepala sekolah SMK Negeri 8 Makassar :

“tugas dari siswa dalam tim untuk melaporkan jika ada siswa atau temannya yang kedapatan merokok di area sekolah, mereka juga melakukan swiping bekerjasama dengan organisasi lain dari situ mereka laporkan ke Guru Bimbingan Konseling yang bertugas menindak lanjuti siswa yang telah dilaporkan tadi misalnya bu tadi saya liat si A merokok di wc jadi guru BK ini memanggil siswa itu ke ruangan BK.” (HR, 54 Tahun)

Untuk menjalankan kebijakan tersebut perlu dilakukan koordinasi. Berikut penjelasan dari Ibu selaku Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 8 Makassar mengenai koordinasi pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok: *“untuk menanggapi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah terdapat koordinasi antara Kepala Sekolah, Guru bimbingan konseling, dan siswa yang tergabung dalam organisasi OSIS dan LSBN.” (HR, 54 Tahun)*

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa belum ada pedoman yang jelas dari pihak sekolah untuk mengatur pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Pihak sekolah sudah melaksanakan perintah untuk memasukan larangan merokok di lingkungan sekolah pada tata tertib sekolah, selain itu pihak sekolah juga telah memasang tanda dilarang merokok di sekolah.

Tim pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar terdiri dari Siswa, Guru Bimbingan Konseling, dan Kepala Sekolah. Tugas pelaksana kebijakan disini adalah mengawasi siswa di sekolah, jika ada siswa yang melanggar akan diberikan sanksi. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tersebut dimulai dari siswa, guru BK dan kepala sekolah yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Disposisi atau Sikap

Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama. Implementasi kebijakan menurut George C. Edward, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementator tidak hanya sekedar mengetahui apa yang mereka harus lakukan, akan tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan terkadang tidak terimplementasikan dengan baik dikarenakan masih adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan pribadi atau organisasi yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan bersama.

Menurut Winarno (2012), jika para implementator bersikap baik dan peduli, dalam artian mendukung suatu kebijakan tersebut maka sangat berkemungkinan mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika sikap atau perspektif paraimplementator berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dapat mensukseskan implementasi kebijakan, untuk itu tuntutan komitmen pada pelaksana kebijakan harus kuat dan penuh dedikasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar yang dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Hanya saja masih terdapat ruangan khusus merokok untuk guru di parkir motor sekolah.

2. Struktur Birokrasi

Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, pemborosan sumberdaya berpotensi mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan selain komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Standar operasional prosedur (SOP) dibuat untuk mempermudah implementasi kebijakan dan memberi pedoman kepada pelaksana kebijakan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar belum dibuat pedoman berupa SOP secara rinci untuk mengatur pembagian tugas pelaksana kebijakan. Namun Implementasi kebijakannya memiliki struktur dan berjalan efektif. Kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah dianggap tidak terlalu rumit sehingga pelaksana kebijakan melakukan tugas sesuai tugas masing-masing. Kepala Sekolah bertugas sebagai pemimpin, inovator, motivator, dan mengawasi berlangsungnya kegiatan di sekolah. OSIS dan LSBN bertugas memberikan informasi jika ada siswa lain yang merokok atau membawa obat-obatan ke sekolah. Guru BK memberikan konseling bahkan sanksi jika ada siswa yang kedapatan merokok disekolah.

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar sudah bisa dimaksimalkan. Pelanggaran yang terjadi di sekolah tersebut perlahan mulai berkurang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada upaya dari pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Negeri 8 Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sikap dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 8 Makassar informan mendukung Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di SMK Negeri 8 Makassar dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 8 Makassar, selama ini belum memiliki SOP namun larang merokok di area sekolah ini telah dimasukkan kedalam tata tertib sekolah. Struktur birokrasi yang ada telah melakukan pembagian tugas dan selalu bekerjasama serta saling mendukung satu sama lain dalam hal menjalankan program kawasan tanpa rokok disekolah. Perlu meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada tiap sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, pembuatan sanksi yang tegas dari dinas pendidikan untuk menertibkan larangan merokok di kawasan sekolah, dan bagi Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 8 Makassar perlu melakukan pendekatan persuasif dari pihak sekolah kepada siswa sekolah yang merokok dan orang tua siswa tentang larangan merokok di kawasan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman teknis pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lantz, DKK. 2018. *Investing in youth tobacco control: a review of smoking prevention and control strategies*. Tobacco Control. diakses pada Maret 2018.
- Mumang AA, Amiruddin R, Ansariadi. Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015. Diakses pada 25 april 2018.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011 No. 7 tahun 2011. diakses pada Maret 2018.
- Peraturan Daerah. 2013. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. diakses pada Maret 2018.
- , 2015. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. diakses pada Maret 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. diakses pada Maret 2018.
- Profil Kesehatan Kota Makassar, 2017. *Data perokok \leq 18 tahun menurut jenis kelamin perpuskesmas kota makassar*. Makassar.
- Profil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Makassar. Makassar. 2018. diakses pada april 2018.
- Ricky Fernando. 2015. *Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di puskesmas pandaran kota semarang*. Semarang. Diakses pada mei 2018.
- Riskesdas. 2013. *Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) tahun 2013*. Jakarta: Badan Litbangkes.
- Rokok itu haram oleh Muhammad Abduh Tuasikal, 2011, (Online) <https://muslim.or.id/6964-rokok-itu-haram.html>. diakses pada february 2018.
- Subarsono. (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. diakses pada Maret 2018.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tilaar, H.AR & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. diakses pada Maret 2018.
- WHO. 2011. *WHO Report On The Global Tobacco Epidemic 2011: Warning About the Dangers of Tobacco*. Geneva: WHO Press.
- . 2008. *MPOWER: A policy package to reverse the tobacco epidemic*. Geneva: WHO.
- Winarno B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. 2012.
- Zismeda Taruna. 2016. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. diakses pada Maret 2018.